

**TINJAUAN TENTANG PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN
PENDIDIKAN DI KECAMATAN MUARA BENGKAL
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Imilda Astuti¹

Abstrak

Imilda Astuti, Tinjauan Tentang Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Melati Dama, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing II.

Penelitian Skripsi ini dilakukan berlokasi di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan Muara Bengkal. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di kecamatan muara bengkal Kabupaten Kutai Timur dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di kecamatan muara bengkal Kabupaten Kutai Timur. Fokus penelitian dalam penelitian terdiri dari pembina, pengembang, pemantau, penasihat, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di kecamatan muara bengkal kabupaten kutai timur.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan informan diambil secara purposive sampling dan accidental sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan akan di analisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di kecamatan muara bengkal Kabupaten Kutai Timur sudah terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan, Pelayanan Pendidikan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah merupakan pencerminan kehendak untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah diperlukan upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: imeldaastuti7@gmail.com

manusia yang memiliki pemikiran intelektual yang tinggi sehingga dapat memahami tentang hakikat dari tujuan pembangunan sehingga dapat terlaksana secara optimal. Peningkatan mutu sumber daya manusia dalam suatu negara dapat dilakukan salah satunya melalui pendidikan. Bahkan demikian pentingnya peranan pendidikan dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia 4 yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk memenuhi amanat kosntitusional tersebut, pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dalam rangka memenuhi hak dasar setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

Untuk itulah demi mencetak generasi muda yang kompetitif, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyusun upaya-upaya dan strategi dalam peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian diharapkan upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat direncanakan secara tepat sasaran sesuai dengan potensi dan hambatan di masing-masing daerah. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam BAB III mengenai "Pembagian Urusan Pemerintahan" pasal 13 dan pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi : (salah satunya adalah) penyelenggaraan pendidikan'.

Kutai Timur sebagai salah satu kabupaten yang terbentuk pasca era reformasi, dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah antara lain yaitu renewable resorces (sumber daya alam yang terbarukan) dan unrenewable resorces (sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui) dengan melalui grand strategy GERDABANGAGRI (Gerakan Daerah Pengembangan agribisnis) yang merupakan salah satu strategi pembangunan yang disusun dengan berorientasi ke masa depan guna tercapainya Visi dan Misi pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, dimana dalam mewujudkan konsep tersebut diperlukan upaya strategis dan efektif dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang taqwa, cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi melalui pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan dan merupakan perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dalam mengimplementasikan peraturan dan kebijakan dalam pendidikan ditingkat kecamatan.

Lembaga UPTD Pendidikan Kecamatan adalah sebagai suatu organisasi tingkat bawah yang mana tugasnya sebagai perpanjangan dari pada Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten sehingga perlu ditangani dengan manajemen yang profesional dan konsisten yang pelaksanaannya di bantu oleh staf-staf yang berkemampuan sehingga tugas-tugas dapat tercapai sesuai target baik di kantor

maupun sekolah. membantu menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di tingkat kecamatan dalam hal Pendidikan, salah satunya dalam melaksanakan penyelenggaraan program wajib belajar 12 Tahun yang di terapkan di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

Kecamatan Muara Bengkal merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai timur. Terdapat permasalahan yang muncul di kecamatan muara bengkal yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana sekolah, sulit nya melakukan berbagai administrasi dalam bidang pendidikan oleh para penyelenggara pendidikan di kecamatan muara bengkal mengingat jarak tempuh kabupaten dan kecamatan sangat jauh terkendala oleh sarana dan prasarana yang terbatas, serta sulitnya mendapatkan informasi baik tentang perubahan kurikulum atau adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kutai timur. Dari pihak dinas pendidikan kabupaten kutai timur sangat kesulitan untuk menjangkau daerah-daerah pedalaman tersebut untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu dengan di bentuk dan berdirinya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan di tingkat kecamatan diharapkan dapat dijadikan sebagai perpanjangan tangan bagi instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dalam mengantisipasi tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat sehingga terwujud pelayanan prima bagi masyarakat khususnya bagi dunia pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Muara Bengkal

KERANGKA DASAR TEORI

1. Kebijakan Publik

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. (Sumber : [id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan publik](http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik))

Menurut Nugroho (2003:2) ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
2. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Kemudian menurut Abidin (2004:31-33) kebijakan secara umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan ;

1. Kebijakan umum , yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

2. Kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat , peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang beradaa di bawah kebijakan pelaksanaan.

a. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007) adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Tahap-Tahap Kebijakan:



Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007)

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

- a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak

tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.
- e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu
Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno: 2010).

c. Kebijakan Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk dapat mencapai kemakmuran suatu negara, sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) menetapkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan ayat (4) menugaskan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Aturan yang termuat dalam ayat (4) tersebut menunjukkan betapa penting dan betapa prioritasnya bidang pendidikan di bumi nusantara ini. Sebanyak 20 persen atau seperlima anggaran pemerintah pusat dan seperlima anggaran pemerintah daerah harus dialokasikan untuk menyelenggarakan pendidikan.

d. Kebijakan Pendidikan Lokal

Pemerintah kabupaten Kutai Timur, mengalokasikan anggaran pendidikan 20% atau sebesar Rp800 Miliar lebih dari APBD tahun anggaran 2014 yang mencapai Rp3,2 triliun. Untuk mereliasikannya pemerintah kabupaten kutai timur memiliki program Kutim CEMERLANG (Cerdas Merata Prestasi Gemilang) dan salah satu program yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah

dalam mensukseskan kutim cemerlang adalah program wajib belajar 12 tahun yang di intruksikan oleh Bupati Kutai timur dan diterapkan diseluruh kecamatan yang ada di kutai timur, untuk memperoleh pendidikan yang merata dan terjangkau.(Sumber :<http://www.poskotakaltim.com/berita/index/99-kutai-timur.html>)

Dengan demikian, jelaslah bahwa negara kita menempatkan pendidikan pada prioritas utama dengan mengalokasikan anggaran terbesar dari semua sektor. Pendidikan merupakan sektor yang memang perlu diprioritaskan negara karena menyentuh langsung hak masyarakat dan sangat terkait erat dengan pembangunan sumber daya manusia masa depan.

2. Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan

Dengan adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan diharapkan dapat dijadikan sebagai perpanjangan tangan bagi instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai timur dalam mengantisipasi tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat, sehingga terwujud pelayanan prima bagi masyarakat khususnya bagi dunia pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan. Dan didasarkan atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam BAB III mengenai “Pembagian Urusan Pemerintahan” pasal 13 dan pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa “Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/Kota meliputi : (salah satunya adalah) penyelenggaraan pendidikan”.

Maka berdasarkan legitimasi peraturan perundang-undangan tersebut serta konsepsi dasar dari makna peranan di atas, dapat di simpulkan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan sebagai suatu bagian dari pemerintahan memiliki peran dalam pembangunan Negara melalui upaya peningkatan Pelayanan Pendidikan yang Bermutu, Merata dan Terjangkau.

untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan memiliki tugas , fungsi dan kewenangan dalam :

1. Menyusun program pengembangan UPT Pendidikan dalam rangka peningkatan pelayanan kerja guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas, bertanggung jawab dan mandiri;
2. Pembina, Pengembang, Pemantau, Penilai Koordinator dan penasihat penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah baik pendidikan formal maupun Non formal dalam upaya mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Sebagai Pembina, Pengembang, Pemantau, dan Penasihat penyelenggara pendidikan UPT Pendidikan memiliki arti :

- a) Pembina adalah sebagai kegiatan memberikan bimbingan bantuan kepada seseorang agar yang bersangkutan dapat memecahkan/mengatasi masalah yang dihadapinya.
- b) Pengembang adalah penyusunan pengembangan program kerja dalam

meningkatkan pelayanan kerja guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

- c) Pemantau adalah kegiatan mencermati, mengamati, merekam, atau mencatat berbagai macam kejadian, baik dari segi akademik(guru dalam proses pembelajaran), maupun segi manajerial (kepala sekolah dalam kegiatan administrasi dan pengelolaan sekolah)
- d) Penasihat adalah memberikan arahan serta memberikan nasihat kepada penyelenggara pendidikan.

3 .Pendidikan

Pendidikan menurut Lavengeld dalam Hasbullah (2005:2) ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat mambantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.

Menurut UU No.20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

4 .Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Inovasi Pendidikan

a. Faktor Kegiatan Belajar Mengajar

Yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar ialah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Guru sebagai tenaga yang telah dipandang memiliki keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, disertai tugas dan wewenang untuk mengelola kegiatan belajar mengajar agar dapat mencapai tujuan tertentu, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan institusional yang telah dirumuskan.

b. Faktor Internal dan Eksternal

1. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan dengan sendirinya juga inovasi pendidikan ialah siswa. Siswa sangat besar pengaruhnya terhadap proses inovasi karena tujuan pendidikan untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa. Jadi siswa sebagai pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan pendidikan.
2. Faktor eksternal yang mempunyai pengaruh dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua. Orang tua murid ikut mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, baik ia sebagai penunjang secara moral membantu dan mendorong kegiatan siswa untuk

melakukan kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan sekolah, maupun sebagai penunjang pengadaan dana.

c. *Sistem Pendidikan (Pengelolaan dan Pengawasan)*

Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Penanggung jawab sistem pendidikan di Indonesia adalah Departemen Pendidikan Nasional yang mengatur seluruh sistem berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan.

5. Definisi Konseptual

Berdasarkan beberapa teori dan konsep yang telah dibahas sebelumnya, maka definisi konseptual dari penelitian ini sebagai berikut :
Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dalam meningkatkan pelayanan pendidikan adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau instansi menyangkut tujuan di dalam suatu proses kegiatan pendidikan, yang diawali dengan proses pembinaan, pengembang, pemantau, penilai Koordinator dan penasihat penyelenggara pendidikan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pemerintah kabupaten kutai timur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini penulis akan membahas hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Pada sub-bab pembahasan ini berisi rangkaian dari suatu penelitian ilmiah untuk mengetahui gambaran yang terjadi.

Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur

1. Pembina

Salah satu peran yang dimiliki oleh UPT Pendidikan Kecamatan Muara Bengkal adalah sebagai pembina, UPT Pendidikan Kecamatan Muara Bengkal bertugas dan berperan sebagai pembina sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan di Kecamatan Muara Bengkal berdasarkan peraturan Bupati Kutai Timur Nomor : 9/02.188.3/HK/II/2010 di bawah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu fungsi dari manajemen SDM Pendidikan.

2. Pengembang

Pengembangan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadi manusia yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, cerdas, terampil.

Pengembang Pendidikan juga diartikan sebagai usaha dan upaya yang dilakukan oleh para penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan mutu

pendidikan melalui penyusunan pengembangan program kerja dalam meningkatkan pelayanan kerja guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

3. Pemantau

Pemantau diartikan juga sebagai pengawas sekolah yang bertugas melaksanakan pengawasan akademik, dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan meliputi penyusunan program, pelaksanaan pembinaan, penilaian kinerja guru dan sarana prasarana sekolah yang difokuskan pada daerah binaan agar berjalan lancar pendidikan yang efektif dan memiliki target capaian yang jelas.

4. Penasihat Penyelenggara Pendidikan

Penasihat penyelenggara pendidikan merupakan sebagai mediator yang menjadi penengah apabila terdapat permasalahan-permasalahan yang sedang di hadapi oleh tenaga pendidik (guru) memberikan solusi untuk kelancaran jalannya pendidikan.

Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran UPT Pendidikan Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur

- 1. Faktor Pendukung** dalam penelitian ini adalah salah satunya internet tersedianya alat kelengkapan kantor seperti komputer dapat membantu mempermudah kerja yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja pelayanan. Yang dulu hanya dengan edaran surat untuk memberikan informasi-informasi tentang masalah pendidikan. Sekarang tinggal langsung kirim lewat e-mail dalam waktu hitungan menit dapat langsung diterima pesan yang ingin disampaikan. Semenjak masuk nya internet di kecamatan muara bengkal memberi kemudahan dalam memberikan pelayanan.
- 2. Faktor Penghambat Peran UPT Pendidikan**

Faktor penghambat pertama ialah kondisi jalan dikarnakan apabila akses jalan di kecamatan muara bengkal masih sangat kurang baik, apabila sudah turun hujan yang deras jalan menjadi licin dan berlumpur hingga mengakibatkan susah nya untuk melakukan akses perjalanan ke tempat yang lebih ke pedalamannya lagi.

Faktor penghambat yang kedua yakni minimnya kendaraan dinas yang dimiliki oleh kantor UPT Pendidikan menyulitkan untuk melakukan pelayanan. Dikarnakan UPT Pendidikan Kecamatan Muara Bengkal hanya memiliki satu mobil dinas saja apa bila mengalami kerusakan sangat sulit sekali untuk melakukan pelayanan pendidikan ke sekolah-sekolah di kecamatan muara bengkal dan sangat membuang waktu kerjanya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran UPT Pendidikan Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Untuk lebih jelasnya, seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan dari setiap fokus penelitian sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran UPT Pendidikan Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. berhasilnya UPT Pendidikan mengembangkan program kerjanya. dengan adanya suatu perubahan yang terdapat pada pelayanan pendidikan dikecamatan muara bengkal. Salah satunya memfokuskan pada program pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, dilihat dari segi banyaknya sekolah-sekolah baru yang sudah bermunculan di kecamatan muara bengkal.
3. Faktor -faktor pendukung dalam peran UPT Pendidikan Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Di Kecamatan Muara Bengkal adalah Peraturan Bupati Kutai Timur (Perbub) Nomor : 9/02.188.3/HK/II/2010 tanggal 16 Februari 2010. Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dan Prasarana(internet). Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam Peran UPT Pendidikan Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Di Kecamatan Muara Bengkal adalah kondisi jalan dan keterbatasan kendaraan dinas(mobil dinas).

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Dikarenakan faktor penghambat ialah sedikitnya kendaraan dinas yang dimiliki, perlu adanya penambahan kendaraan dinas, UPT Pendidikan bisa mengusulkan untuk penambahan kendaraan dinas satu lagi supaya apabila ada kendala seperti yang diungkapkan sebelumnya bisa diminalisir secepatnya di kantor UPT Pendidikan kecamatan muara bengkal untuk memudahkan kinerja pegawai. Serta untuk memperlancar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Kantor UPT Pendidikan harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak kantor Kecamatan Muara Bengkal serta pada Dinas Kabupaten untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak yang menghubungkan antar desa-desa di kecamatan muara bengkal.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2014. Buku saku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur
- Abidin, Said Zainal. 2004 Kebijakan Publik. Pancor Siwah, Jakarta.
- Ahmadi, Abu dan Uhbiyanti, Nur.,2001. Ilmu Pendidikan., Rineka Cipta. Jakarta.
- Ali Achmad,2003. Pintar Berbahasa
- Arikunto, Suharsimi, 2002. Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke- III. Jakarta : Balai Pustaka
- Dunn, William., 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua., Gajah Mada University press, Yogyakarta.
- Hasbullah. 1996. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (edisi revisi) Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2009. Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1990. Sosiologi Suatu Pengantar edisi keempat, Rajawali Pers, Jakarta
- Sugiyono, 2004. Metodologi Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.
- Tilaar, H.A.R.2000. Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta
- Widodo. 2001. Kamus Ilmiah Populer, Absolut ,Yogyakarta

Dokumen-dokumen :

- Undang-Undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Surabaya : Karina
- Undang-Undang Sidiknas No. 20 Tahun 2003 : Fokus Media

Sumber Internet :

- <https://www.google.com/pelayanan publik>(diakses 25 Oktober 2014)
- <http://Fpusbindiklatren.bappenas.go.idSTANDAR PELAYANAN MUTU>(diakses 25 Oktober 2014)
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang Pelayanan Publik](http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pelayanan_Publik) (diakses 25 Oktober 2014)
- <http://www.poskotakaltim.com/berita/index/99-kutai-timur.html>(diakses28 Oktober 2014)
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan publik](http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik) (diakses 14 nopember 2014)
- <http://www.anneahira.com/kebijakan-pendidikan-nasional.html>(diakses14 nopember 2014)